

**PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, POLITIK ANGGARAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MUTTAKIN
NPM : 1602110094**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUTTAKIN
NPM : 1602110094

Dengan judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, POLITIK ANGGARAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

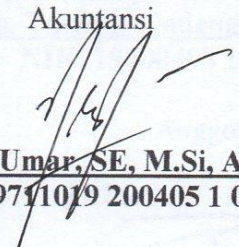
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

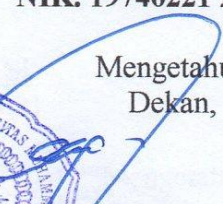

I. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001


M. Fahriansyah, SE, M.Si, Ak.
NIK. 19770403 200604 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUTTAKIN
NPM : 1602110094

Dengan judul:

**PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, POLITIK ANGGARAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 11 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Anggota

Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Yang Menyatakan



MUTTAKIN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muttakin
NPM : 1602110094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

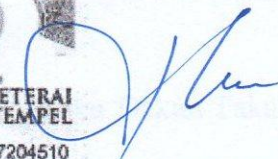
PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, POLITIK ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan


MUTTAKIN

10000
METERAI
TEMPEL
SA545AJX017204510

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD (OPD) Kabupaten Nagan Raya”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Dr. Surna Lastri, SE, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bapak M. Fahriansyah, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
8. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
9. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Muttakin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 11
2.1 Landasan Teoritis.....	11
2.1.1 Anggaran Sektor Publik	11
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	11
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	13
2.1.2. Penyerapan Anggaran.....	16
2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran	16
2.1.2.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Penyerapan Anggaran	16
2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran	18
2.1.3 Regulasi.....	19
2.1.3.1 Pengertian Regulasi.....	19
2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Regulasi	20
2.1.3.3 Indikator Regulasi	20
2.1.4 Politik Anggaran	21
2.1.4.1 Pengertian Politik Anggaran	21
2.1.4.2 Indikator Politik Anggaran	22
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia	22
2.1.5.1 Pengertian Kompetensi	22
2.1.5.2 Dimensi Kompetensi.....	24
2.1.5.3 Manfaat Kompetensi	25
2.1.5.4 Indikator Kompetensi	26
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
2.4 Hipotesis	31
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
3.1 Desain Penelitian	33

3.1.1 Tujuan Penelitian	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	33
3.1.3 Horizon Waktu.....	33
3.1.4. Unit Analisis	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Operasional Variabel	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	38
3.6.1 Pengujian Validitas	38
3.6.2 Pengujian Reliabilitas	39
3.7 Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
4.1. Karakteristik Responden	41
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
4.2.1 Variabel Penyerapan Anggaran	43
4.2.2 Variabel Regulasi.....	44
4.2.3 Variabel Politik Anggaran	46
4.2.4 Variabel Kompetensi SDM.....	47
4.3. Hasil Pengujian Data.....	49
4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	49
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	50
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.4.1 Koefisiene Regresi	52
4.4.2. Koefisien Korelasi dan Determinasi	53
4.4.3. Pengujian Hipotesis	55
4.4.4.1 Pengujian Secara Parsial	55
4.4.4.2 Pengujian Secara Simultan	56
4.6. Implementasi Hasil Penelitian	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran-saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1 Horizon Waktu	33
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel.....	34
Tabel 3.3 Skala Pengukuran	34
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	41
Tabel 4.2 Gambaran Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.....	43
Tabel 4.3 Gambaran Kesiapan Pejabat Menghadapi Regulasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya	44
Tabel 4.4 Gambaran Persepsi Pejabat Terhadap Politik Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya..	46
Tabel 4.5 Gambaran Tingkat Kompetensi SDM Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.8 Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran dan Kompetensi SDM Terhadap Penyerapan Anggaran.	42
Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN DAN KOMPETENSI SDM
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN NAGAN RAYA**

OLEH

NAMA : MUTTAKIM
NIM : 1602110094

Pembimbing :

1. Dr. Surna Lastri, SE, M.Si
2. M. Fahriansyah, SE, M.Si, Ak

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan di seluruh SKPD di Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah sebanyak 81 pejabat atau masing-masing SKPD mewakili 3 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan kuesoner tertutup. Hasil penelitian menjelaskan regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya. Kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Nagan Raya. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya. Secara simultan regulasi anggaran, politik anggaran dan kompetensi SDM pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya.

Kata kunci: regulasi, politik anggaran, kompetensi SDM, penyerapan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (Negara Kesejahteraan). Dengan landasan tersebut negara Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dinamika perkembangan penduduk menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasana dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan pemerintah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program kerja instansi yang akuntabel, efisien dan efektif (Ridwan dan Ahmad, 2020:11).

Program kerja pemerintah daerah adalah rencana kerja anggaran pemerintah dalam periode tertentu dari suatu bidang/unit kerja, fungsi, dan bagian yang berisikan target-target yang akan di capai baik fisik maupun keuangan. Program kerja pemerintah menjadi implementasi kebijakan sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Khusaini, 2019:14). Fungsi rencana kerja anggaran pemerintah daerah di katakan baik jika memiliki dampak yang sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan peran serta masyarakat (Sujatmika, 2020:216). Dengan fungsi tersebut maka penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi stimulus dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara di seluruh Indonesia.

Penyerapan anggaran pada SKPD adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan oleh SKPD tersebut dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah (Ramdhani dan Indi, 2017). Namun dalam realita berbagai hambatan telah timbul dalam penyerapan anggaran publik di berbagai daerah Indonesia seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran maupun kondisi kegagalan SKPD dalam memenuhi target anggaran dalam tahun anggaran. Kondisi ini telah dan akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya didukung oleh 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2019). Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik, setiap SKPD di Kabupaten Nagan Raya akan terlibat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran secara efisien dan efektif hingga pertanggungjawaban anggaran hingga anggaran tersebut dapat dicairkan untuk berbagai kebutuhan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Penyerapan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahun telah menunjukkan ukuran dan upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam realita berbagai hambatan juga dihadapi pemerintah di Kabupaten ini sejak perencanaan hingga penggunaan dan pencairan anggaran.

Penyerapan anggaran oleh 28 SKPD yang berada di bawah struktur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kapabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hasilnya dari 8 sasaran strategis dan 43 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam program kerja pemerintahan Kabupaten Nagan Raya diperoleh rata-rata tingkat penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 91,88% atau masuk dalam kategori baik. Program kerja mewujudkan penegakan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH menjadi program kerja dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi yaitu mencapai 111,29 % (sangat baik). Sementara program kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan adat, budaya serta pemuda dan olah raga guna meningkatkan daya saing daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga menjadi program kerja dengan tingkat penyerapan anggaran terendah yaitu mencapai 49,51% (kurang baik) (LAKIP, Pemerintah Daerah Nagan Raya, 2021). Banyak faktor yang mempengaruhi baik tidaknya tingkat penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya termasuk diantaranya adalah regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan kompetensi Sumber Daya Manusia pejabat daerah.

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan daerah atau keuangan negara yang menjadi hak daerah untuk pelaksanaan pembangunan agar berjalan tertib dan lancar dalam kerangka otonomi daerah (Komarudin dan Asep, 2020:55). Regulasi telah membuat perencanaan anggaran untuk program kerja instansi, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawabannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baik itu Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan-peraturan lainnya yang mengingatkan para pejabat dan bendaharawan daerah untuk bertindak (Sanjaya, 2018).

Regulasi sebagai produk dari yudikatif adalah suatu proses untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan eksekutif dan legislative (pejabat dan bendaharawan daerah) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Hadirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta sejumlah Peraturan Daerah yang mengaturnya telah membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada SKPD harus dilaksanakan sesuai ketetapan waktu atau tidak dapat direncanakan dan dilaksanakan lebih cepat atau lebih lambat serta membutuhkan sejumlah pra syarat yang lengkap. Format ini sangat mempengaruhi dalam penyerapan anggaran (Mustika, 2020).

Dalam realita regulasi menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab lambatnya penetapan APBD. Penetapan APBD rata-rata baru dilakukan pada Bulan April setiap tahun anggaran sehingga waktu pelaksanaan anggaran sangat pendek. Kemudian proses panjang birokrasi akibat regulasi dalam pengelolaan keuangan termasuk keterlambatan petunjuk teknis dan berbelitnya prosedur pelaksanaan anggaran juga menjadi beberapa masalah yang sering menghambat penyerapan anggaran dari aspek regulasi (Sinaga, 2018)

Kemudian politik anggaran juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada. Politik anggaran (*politics of budgeting*) adalah proses saling memengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas anggaran untuk program kerja tertentu akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Kepala daerah yang diangkat melalui jalur politik bersama dengan pejabat daerah dan pihak eksekutif (DPRD) dalam menentukan alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat bukan hanya semata-mata atau seluruhnya untuk kebutuhan publik namun adanya keputusan dan kepentingan

politik yang diharapkan termasuk untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu (Mustika, 2020).

Politik anggaran melibatkan proses politik yang terjadi dalam penentuan dan pengalokasian anggaran publik. Apakah anggaran yang direncanakan seluruhnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun sebahagian digunakan untuk kepentingan aktor politik yang bersifat populis dan pragmatis. Dimana penggunaan anggaran dalam mendanai berbagai macam bentuk kebutuhan publik lebih di dominasi oleh pihak legislative mereka berdalil bahwa mereka ada untuk rakyat dan bersama rakyat walaupun rencana anggaran yang di anggarakan lebih berorientasi untuk membangun citra positif mereka (Ramadhani dan Mia, 2019).

Adanya dampak dan manfaat yang diharapkan oleh kelompok aktor politik, juga membuat tidak sedikit dari proyek-proyek pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok politik. Jika tidak diakomodasi dengan baik maka pihak eksekutif yaitu pejabat daerah akan menemukan berbagai kendala dan hambatan mulau dari usulan perencanaan hingga dalam pelaksanaannya seperti terjadi revisi anggaran atau jadwal pengesahan anggaran yang tertunda. Atau sebaliknya apabila kebutuhan untuk elit politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai, ini disebabkan karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas yang disepakati bersama dan akan sangat cepat disetujui eksekutif (Verniati, 2022).

Kemudian disamping regulasi dan politik anggaran, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran di Kabupaten Nagan Raya. Menurut Permen PAN No 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara kompetensi adalah suatu kemampuan kerja aparatur negara yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh motif dan sikap kerja yang baik. Standar kompetensi ASN adalah

adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Hadirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN membuat kompetensi menjadi salah satu kebijakan penting dalam manajemen Kepegawaian Negeri Sipil termasuk dilingkungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, mengharuskan semua Aparatur Sipil Negara pada semua organisasi pemerintah harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang di persyaratkan khususnya standar kompetensi teknis yang berkaitan langsung dengan tugas seksi maupun kompetensi lainnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya kerja (Sumanti, 2018).

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati dari aparatur pemerintah, dapat diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya misalnya pegawai yang bekerja pada Bidang Informatika harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang software dan hard ware computer, termasuk masalah teknisi dan programmer komputer. Bidang keuangan dan akuntansi harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang pembukuan, penatausahaan maupun pelaporan. Sementara kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku aparatur pemerintah yang dapat diamati dari individu ASN, terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan pihak lain yang majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017). Aparatur yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya dapat

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan (Trotter (1986) dalam Yusuf (2021:4).

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran memang membutuhkan pejabat pengelolaan keuangan yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan dan perilaku kerja yang baik di sepanjang struktur organisasi pemerintah di Kabupaten Nagan Raya. Namun dalam realita tidak semua pejabat di lingkungan kerja Kabupaten Nagan Raya yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang diinginkan. Kondisi tersebut nampak jelas dari fakta dimana perencanaan yang di buat sering lebih besar dari kemampuan SKPD untuk merealisasikannya dan bahkan sebahagian dari pejabat tidak mampu melaksanakannya karena kurangnya kemampuan, ide-ide atau keputusan yang tepat waktu. Kondisi ini membuat SKPD tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

Sistem pengembangan Aparatur Sipil Negara sedemikian rupa oleh Pemerintah Pusat selama satu dasawarsa sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, memang telah melahirkan berbagai konsep dan gagasan baru dalam meningkatkan kompetensi pejabat di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Nagan Raya. Namun pengembangan tersebut belum cukup optimal dapat meningkatkan ide-ide, keputusan dan kemampuan pejabat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Promosi dan pengangkatan seorang pejabat daerah untuk menduduki pimpinan eselon II maupun III yang penuh dengan koneksitas dan sering dilakukan secara subjektif membuat kompetensi pejabat di Daerah ini sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya terdapat sejumlah pejabat yang tidak mampu membuat perencanaan anggaran sesuai sumber daya instansi dan sering membuat mereka memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dalam menggunakan anggaran. Bahkan ada sebahagian pejabat pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran

sangat berhati-hati dan enggan untuk membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana.

Lemahnya kompetensi sering membuat mereka takut terjatuh dengan masalah hukum dalam penggunaan anggaran. Jika dalam pelaksanaan anggaran penuh dengan kehati-hatian akan menyebabkan proses pelaksanaan anggaran akan terhambat karena adanya berbagai macam pertimbangan termasuk pemeriksaan ulang yang memakan waktu lama (Alfayuni dan Neneng, 2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia pejabat daerah merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Semakin baik kompetensi Kualitas Sumber Daya Manusia maka semakin baik tingkat penyerapan anggaran (Syahwil dan Irma, 2022).

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD (OPD) Kabupaten Nagan Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
2. Apakah regulasi berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
3. Apakah politik anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan usraian rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh politik anggaran secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik melalui tersedianya bahan referesin yang berkaitan dengan pengaruh regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.

2. Praktis

- a. Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan penyerapan anggaran.
- b. Meningkatkan kemampuan aplikasi teori yang lebih baik bagi penulis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel regulasi anggaran, politik anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan penyerapan anggaran dengan objek penelitian adalah pejabat daerah dan bendaharawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan pada SKPD Kabupaten Nagan Raya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah regulasi keuangan SKPD untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran berisi estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi rencana kerja (*plan for action*) bagi para pejabat untuk mencapai tujuan dari program kerja pemerintah. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2018:77).

Menurut *National Committee on Goversimental Accounting* (NGGA) yang saat ini telah menjadi *Govermental Accounting Standards Board* (GASB) yang dikutip dalam Bastian (2017:164) mendefinisikan anggaran (*budget*) sektor publik adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Yuliani (2019:27) anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estetika kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, namun juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Lebih lanjut Mardiasmo (2018:61) menyatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Kemudian Nurkholis dan Khusaini (2019:1) penganggaran Sektor Publik menjelaskan konsep penganggaran dan anggaran adalah:

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan regulasi strategik yang telah dibuat. tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan regulasi yang disusun.

Hantono et al., (2021:40) anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resource to unlimited demands*). Sedangkan Freeman dan Shoulders (2003) juga dalam Hantono et al., (2021:40) menyatakan anggaran adalah *The process of allocating resources to unlimited demands* (Proses pengalokasian sumber daya untuk permintaan yang tidak terbatas). Pada entitas sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dibandingkan entitas pada privat anggaran umumnya bersifat rahasia internal perusahaan

Dengan demikian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018:76) adalah sebagai berikut:

suatu rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Bastian (2017:166) anggaran sektor publik tersebut pada umumnya memiliki beberapa karakteristik adalah :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik, karena anggaran sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan lainnya (Sujatmika, 2020: 2). Dengan demikian anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama : 1. Sebagai alat regulasi 2. alat pengendalian 3. alat kebijakan fiskal 4. alat politik 5. alat koordinasidan komunikasi 6. alat penilaian kinerja 7. alat motivasi (Nurkholis dan Khusaini (2019:6).

Anggaran memiliki fungsi yang multidimensional dalam organisasi. Menurut Mardiasmo (2018:63) fungsi anggaran secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat regulasi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.
5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.
7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik

Lebih jelas Hantono et al., (2021:43) menjelaskan secara luas fungsi anggaran sektor publik adalah:

1. Anggaran sebagai Alat Regulasi (*Planning Tool*)
 Anggaran merupakan alat regulasi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat regulasi digunakan untuk:
 - a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
 - b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
 - c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 - d. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Anggaran sebagai Alat Pengendali (*control tool*)
 Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan – pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
 Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)
 Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*)
 Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian, terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
 Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivasi Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Kemudian Bastian (2017:164) menjelaskan beberapa fungsi anggaran adalah:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen fiskal.

2.1.2 Penyerapan Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Masyarakat umum menyebutnya dengan pencairan anggaran. Dengan demikian penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Halim, 2017: 84). Mardiasmo (2009:162) dalam Fajar dan Muhammad (2017) mengatakan Penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) dalam Ramdhani dan Indi (2017) penyerapan anggaran pada satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Kemudian Kuncoro dalam Harahap (2020) mengatakan penyerapan anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi”

Menurut Halim (2014: 84) dalam Ramadhani dan Mia (2019), mengatakan bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Sanjaya (2018) menjelaskan secara luas mengenai penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

penyerapan anggaran merupakan salah satu tahap dari siklus anggaran, yang berlangsung setelah perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahapan penyerapan anggaran akan dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan Negara (APBN) atau APBD disahkan oleh DPR. Penyerapan anggaran berkaitan dengan kesanggupan SKPD dalam merealisasikan anggaran secara cepat dan tepat.

BPK (2011) dalam Zulaikah dan Dian (2019) mengatakan Pemerintah Daerah seharusnya dapat melakukan penyerapan anggaran secara ideal yaitu penyerapan anggaran yang dilakukan secara merata dari Triwulan I hingga Triwulan IV yang masing-masing triwulannya terserap sebesar 25% dari jumlah anggaran yang ada. Kemudian Handajani dan Effendy (2018) mengatakan tentang penyerapan anggaran yang ada kaitannya dengan pelaksanaan anggaran adalah:

Penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun berdampak terhadap terjadinya penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena penyerapan anggaran menjadi tolok ukur dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Penyerapan Anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran

diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam kompetensi sumber daya manusia dan berbagai faktor internal lainnya (Nugroho dan Salman, 2017).

Ani et al., (2020) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya program kerja pemerintah adalah sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).
- 2 Proses Kompetensi sumber daya manusia
Kompetensi sumber daya manusia pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari regulasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Semakin meningkatnya proses kompetensi sumber daya manusia akan semakin kebutuhan dan realisasi anggaran.
- 3 Komitmen Organisasi
Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan– tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan komitmen organisasi adalah tingkatan dimana seseorang memposisikan dirinya pada organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian kepentingan organisasinya. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan setiap anggota memberdayakan seluruh kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan – pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.
- 4 Regulasi Anggaran
Regulasi anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Regulasi merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Semakin berkualitas regulasi anggaran maka akan semakin realita tingkat pencapaiannya di masa depan tanpa banyak kendala yang dihadapi.

Mustika (2020) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran adalah sebagai berikut

1. Regulasi
2. Politik anggaran
3. Perencanaan anggaran
4. Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Kompetensi sumber daya manusia
6. Pelaksanaan Anggaran

Kemudian Sanjaya (2018) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada instansi pemerintah terdiri dari:

1. Regulasi Anggaran
2. politik anggaran
3. Kompetensi sumber daya manusia

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Ramadhani dan Mia (2019) adalah sebagai berikut:

1. Regulasi,
2. Politik Anggaran
3. Perencanaan Anggaran
4. Sumber Daya Manusia
5. Pengadaan Barang/ Jasa

2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran

Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran menurut Noviwijaya, Rohman (2013) dan Suhartono (2011) yang dikutip dalam Fajar dan Muhammad (2017). adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran;
2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran

2.1.3 Regulasi

2.1.3.1 Pengertian Regulasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia regulasi dijelaskan sebagai peraturan. Peraturan berasal dari dasar aturan yaitu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti. Regulasi adalah peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang. Implementasi regulasi adalah bentuk keputusan-keputusan pihak eksekutif untuk melaksanakan aturan tersebut yang hirarkinya berada di bawah pembuat keputusan (Jaharuddin dan Radiana, 2020:4).

Teske (2004:31) dalam Komarudin dan Asep · (2020:55) mengatakan regulasi didefinisikan sebagai ketika pemerintah mengendalikan atau membatasi aktivitas tertentu. Sari et al., (2022:126) Regulasi adalah proses pengaturan dan pemberian batasan untuk sebuah organisasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan yaitu untuk mengendalikan manusia atau masyarakat.

Menurut Selviany (2022:17) regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan di patuhi oleh semua pihak. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swaregulasi. Kemudian Bastian (2010) dalam Mustika (2020) mengatakan regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya.

Badwin dalam Komarudin dan Asep (2020:57) menjelaskan regulasi adalah seperangkat aturan yang seharusnya menjadi kewajiban yang dipaksakan oleh Lembaga Negara dalam tiga perspektif yaitu aktivitas sosial ekonomi, ekonomi politik, semua mekanisme control sosial, norma sosial dan nilai dalam lingkungan. Sistem

regulasi keuangan daerah menurut Sanjaya (2018) adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Regulasi

Fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau control bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Dengan adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak di ambil (Selviany, 2022:17).

Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan menurut Sari et al., (2022:126) adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Baldwin dalam Komarudin dan Asep (2020:58) terdapat tiga tujuan regulasi yaitu:.

1. *Public Interest* yaitu merujuk pada asumsi yang bersifat normative bahwa *goodgovernment* dapat berjalan dalam masyarakat demokratis dan melayani mayoritas kelompok masyarakat dengan baik. Dalam bidang ekonomi, *public interest* adalah aktivitas Negara atau agen dari publik interest secara umum dalam mempengaruhi pasar.
2. Dalam bidang politik, regulasi digunakan untuk merefleksikan masyarakat untuk kepentingan politik termasuk partai politik. Regulasi digunakan untuk menunjukkan hasil kinerja penyelenggara Negara.
3. Dalam pendekatan *micro economic theory*, pelaksanaan regulasi bertujuan untuk mengetahui secara jelas tujuan pribadi, perilaku individu dan keputusan individu. Regulasi digunakan sebagai komoditas yang dibeli oleh kekuatan ekonomi untuk memperkuat proses ekonomi. Sehingga regulasi dapat mendistorsi efisiensi pasar.

2.1.3.3 Indikator Regulasi

Regulasi keuangan daerah menurut Sanjaya (2018) dapat diukur melalui tiga indikator antara lain:

1. Pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan
2. Mempelajari regulasi
3. Kepatuhan terhadap regulasi

2.1.4 Politik Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Politik Anggaran

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (political tool) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2002 dalam Ranadhani dan Mia, 2019). Menurut Hartono, et al, (2021:45) munculnya politik anggaran adalah sebagai berikut:

Anggaran sebagai alat politik, digunakan untuk memutuskan prioritas prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu berdasarkan keputusan politik. Anggaran bukan hanya masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Kondisi yang membuat munculnya politik anggaran.

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya (Sanjaya, 2018).

Hamka et al., (2022) mengatakan politik anggaran adalah mekanisme kontrol politik antar stakeholder yang memiliki kepentingan dalam memutuskan alokasi anggaran dan pengeluaran pemerintah, yang terkait dengan penggunaan anggaran dialokasikan untuk siapa, kelompok siapa, di mana, dan kapan waktu pengalokasiannya. Politik anggaran (politics of budgeting) menurut Karianga (2015:1) adalah proses saling memengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan

dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

Santoso · (2018:67) mengatakan politik anggaran atau juga disebut kebijakan anggaran ialah kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengubah arah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Abdullah (2010) dalam Sanjaya (2018) politik anggaran adalah sebagai berikut:

politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini proses penetapan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik. Politik anggaran memang tak dapat dihindari, hal ini terjadi sebuah tarik menarik kepentingan pemerintah dengan legislatif secara langsung dapat mempengaruhi dalam implementasian program kerja.

2.1.4.2 Indikator Politik Anggaran

Politik anggaran menurut Sanjaya (2018) dapat diukur melalui tiga indikator antara lain:

1. Pengalokasian anggaran,
2. Asas kebutuhan,
3. Asas keadilan.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Secara etimologi kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik (Sutrisno, 2020:202). Kemudian Marwansyah (2019:36) mengemukakan bahwa kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam

sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan.

Kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Edison *et al.*, (2018:140), “karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan dengan hubungan kausal atau sebab-akibat pelaksanaan yang efektif dan/atau unggul dalam pekerjaan atau keadaan”. Menurut Mitrani dalam Busro (2018:25) “mengemukakan bahwa kompetensi adalah bagian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan”.

Kompetensi menurut Mustika *et al* (2020) menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap pegawai yang menjadikan mereka mampu untuk melakukan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka. Suyana dalam Busro (2018:26) mengungkapkan sebagai berikut:

Kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung resiko (*risk bearing*), dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Wibowo (2018:110) menjelaskan kompetensi menunjukkan pada kemampuan seseorang mengelola pekerjaan dan serangkaian aktivitas untuk mencapai target dengan keahlian, keterampilan dan didukung oleh sikap kerja. Kompetensi menurut Sutrisno (2020:203) adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.

2.1.3.2 Dimensi Kompetensi

Melalui studi yang cukup mendalam, Hart dalam Busro (2018:29) mengemukakan bahwa kompetensi kerja para pegawai merupakan kemampuan kerja pegawai yang dapat dilihat dari:

1. Orientasi pencapaian prestasi;
2. Pemikiran analisis;
3. Kemampuan dalam berhadapan dengan kondisi serba tidak pasti;
4. Pengambilan keputusan;
5. Kepemimpinan;
6. Kerja jejaring;
7. Komunikasi lisan;
8. Dorongan pribadi dan inisiatif;
9. Kemampuan untuk membujuk;
10. Perencanaan dan pengorganisasian;
11. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik;
12. Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri;
13. Kerja kelompok;
14. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;
15. Komunikasi tertulis.

Setiap organisasi menginginkan agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan. Sumber daya manusia seperti itu menurut Sutrisno (2020:8) hanya akan diperoleh dari pegawai atau anggota organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
2. Memiliki pengetahuan (*knowledges*) yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan (*skills*) yang diperlukan.
4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, dan loyal.

Sumber daya manusia yang potensial berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Spencer and Spencer dalam Wibowo (2018:111) terdapat lima aspek karakteristik atau komponen-komponen/elemen yang membentuk kompetensi, yaitu: *motives* (motif), *traits* (karakter pribadi/sifat), *self concept* (konsep diri), *knowledge* (pengetahuan) dan *skills* (keterampilan).

Seluruh unsur diatas, menurut Hart dalam Busro (2018:30), apabila dikelompokkan dapat dibagi dalam dimensi menjadi tiga, yaitu:

1. Dimensi pengetahuan meliputi indicator: pemikiran analisis, pengambilan keputusan, peningkatan pengetahuan yang dimiliki, orientasi pencapaian prestasi;
2. Dimensi keterampilan, dengan indicator: keterampilan komunikasi tertulis, komunikasi lisan, dorongan peningkatan keterampilan, dorongan peningkatan keterampilan, dorongan menjadi pribadi dan inisiatif.
3. Dimensi kemampuan dengan indicator: kemampuan kerja kelompok, kemampuan pengembangan diri.

2.1.3.3 Manfaat Kompetensi

Kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia menurut Yuniarsih dan Suwatno (2021:22) memainkan peran kritikal dan esensial karena disatu sisi merupakan *human capital* dan *active agent* bagi pengembangan suatu organisasi, dan disisi lain merupakan faktor determinan kapabilitas yang merupakan sekumpulan keahlian dan keterampilan dalam mengkoordinasi dan mengintegrasikan sumber daya manusia.

Menurut Wibowo (2018:271) kegunaan kompetensi bagi karyawan dan organisasi adalah sebagai berikut:

kompetensi sangat berguna untuk membantu oraganisasi menciptakan budaya kerja yang tinggi. Kompetensi sangat diperlukan dalam berbagai tahapan proses manajemen sumber daya manusia dan juga untuk mengkomunikasikan nilai dan standar organisasi, memperbaiki budaya organisasi meningkatkan kualitas perekrutan tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia, menjadi dasar yang kuat untuk pelatihan dan pemberian kompensasi.

Menurut Yusuf (2021: 6) dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi, terdapat beberapa manfaat dari kompetensi tersebut.

- 1) Manfaat terhadap pegawai atau karyawan.
Penerapan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk bekerja secara otomatis akan mendapatkan pengakuan kualifikasi. Kompetensi juga dapat digunakan untuk pengembangan karir dengan cara meningkatkan keterampilan dengan berbagai pelatihan yang adsa.
- 2) Manfaat Kompetensi Bagi Organisasi
SDM kompetensinya yang sudah teridentifikasi akan memberikan manfaat melalui keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.1.3.4 Indikator Kompetensi

Menurut Sadarmayanti (2019:211) kompetensi itu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang digunakan untuk meningkatkan kinerja atau keadaan atau kualitas yang memadai atau sangat berkualitas, mempunyai kemampuan untuk menampilkan peran tertentu. Adapun indikator dari kompetensi adalah:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
Informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu contoh : mengerti ilmu manajemen keuangan.
2. Keterampilan (*Skill*)
Keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik. Contoh : Kemampuan mengemudi.
3. Perilaku (*Attitude*)
Respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar.

Indikator kompetensi menurut Wibowo (2018: 111) dapat dikembangkan dalam 4 unsur yaitu sebagai berikut:

1. Motif
Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan.
2. Sifat
Sifat adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. Konsep diri
Konsep diri adalah sikap dan nilai-nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang. Konsep diri merupakan sebagai perilaku yang dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai suatu makhluk fisik, sosial, spiritual dan moral.
4. Pengetahuan
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. Keterampilan
Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Sanjaya (2018) Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan

koefisien $\beta = -0,014$ pada batasan nilai signifikansi $0,903 > 0,05$. Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien $\beta = 8,952$ pada batasan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien $\beta = -0,032$ pada batasan nilai signifikansi $0,664 > 0,05$.

Ramadhani dan Mia (2019) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menjelaskan regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/ jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan politik anggaran dan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran

Mustika (2020) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja dan regulasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Penelitian Rika dan Jouzar (2020) Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Hasil penelitian menjelaskan. Namun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengadaan barang dan jasa secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja.

Syahwil dan Irma (2022) Pengaruh faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Sebelumnya

No	Judul/ Peneliti	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat (Sanjaya, 2018)	Analisi regresi linier berganda	regulasi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: regulasi anggaran, politik anggaran dan kompetensi SDM ,	- Lokasi dan objek penelitian - Populasi dan Sampel penelitian. - Variabel pelaksanaan anggaran
2	Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada	Analisi regresi linier berganda	regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/ jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan	- Variabel dependent: Penyerapan anggaran - Variabel independent: regulasi anggaran , kualitas	- Lokasi dan objek penelitian - Populasi dan Sampel penelitian. - Variabel perencanaan
	OPD Provinsi Sumatera Barat (Ramadhani dan Mia, 2019)		anggaran belanja. Sedangkan politik anggaran dan Kompetensi Sumber Daya	SDM, komitmen organisasi - Model analisis	an anggaran, kualitas SDM,

No	Judul/ Peneliti	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran		
3	Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). (Mustika, 2020)	Analisi regresi linier berganda	politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Regulasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja. Perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: Politik anggaran, regulasi dan kompetensi sumber daya manusia - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Populasi dan Sampel penelitian - Variabel Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM.
4	Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi (Rahmawati dan Jouzar, 2020)		Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaranbelanja. Sedangkan pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja	- Variabel dependent: penyerapan anggaran - Variabel independent: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa - Model analisis	- Lokasi dan objek penelitian - Populasi dan Sampel penelitian - Variabel Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Regulasi dengan Penyerapan Anggaran

Regulasi adalah konsep penting yang mengacu pada seperangkat aturan, pedoman dan prinsip yang dilakukan oleh pemerintah atau Badan Pengatur lainnya untuk memandu dan mengendalikan perilaku individu atau organisasi untuk menciptakan keadilan, efisiensi dan kesejahteraan sosial (James, 2018: 30). Tujuan regulasi adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan publik, dan jika tidak dilakukan regulasi akan adanya praktik-praktik yang tidak efisien dan tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel (Apriyanti (2018:51). Dengan adanya regulasi yang jelas maka dapat menghilangkan berbagai kegiatan yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk dalam penyerapan anggaran. Namun jika adanya penyimpangan dari ketentuan yang ada maka akan menghambat pelaksanaan anggaran.

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah di seluruh SKPD. Artinya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku jika tidak maka akan mendapat hambatan-hambatan di kemudian hari. Regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada (Sanjaya, 2018). Permasalahan regulasi ini terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, sehingga perubahan regulasi terjadi menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu (Ramadhani dan Mia, 2019). Regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Ramadhani dan Mia, 2019).

2.3.2 Hubungan Politik Anggaran dengan Penyerapan Anggaran

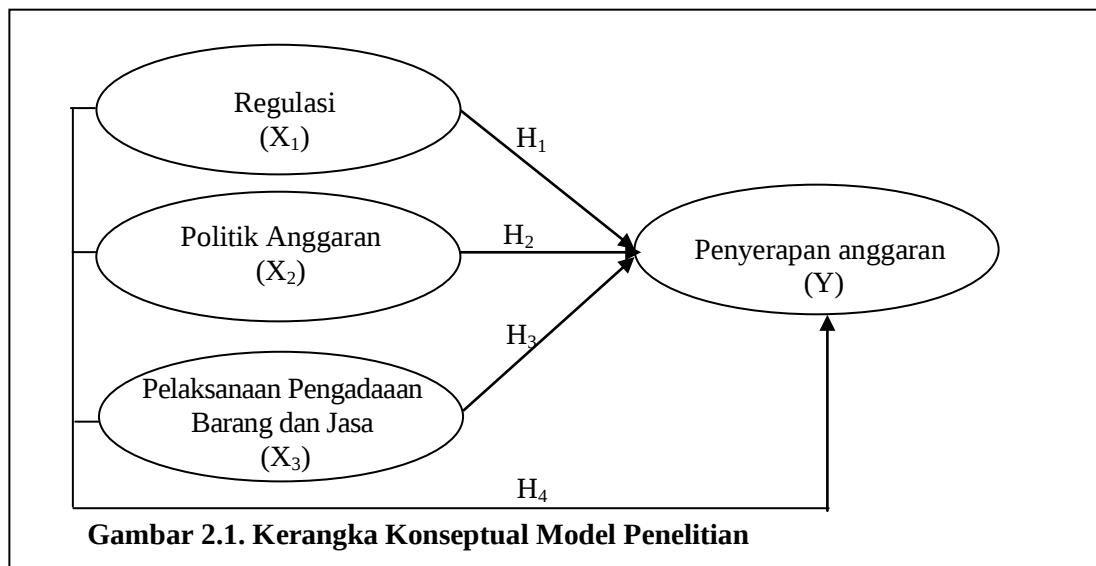
Politik anggaran juga menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Apabila anggaran yang direncanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat memperlambat waktu kegiatan/program kerja. Hal ini membuktikan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai, ini disebabkan karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas disepakati bersama dan disetujui eksekutif. Politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Ramadhani dan Mia, 2019).

2.3.3 Hubungan Kompetensi SDM dengan Penyerapan Anggaran

Baik penyerapan anggaran merupakan bahagian dari keberhasilan dalam kompetensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran. Namun permasalahan yang timbul seperti keluhan dari para pengguna anggaran yaitu ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas barang yang didapat, masih sering terjadi keterlambatan pengiriman, proses pelaksanaan pengadaan di lapangan yang tidak berjalan lancar/ banyak hambatan, misal terjadi lelang ulang, banyaknya sanggahan, dan ada penyedia barang yang ingkar janji (Wicaksono, dkk 2007 dalam Sanjaya, 2018). Serapan anggaran dapat terjadi keterlambatan karena proses tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan. Lambatnya proses lelang serta adanya konflik-konflik yang terjadi selama proses tender akan membuat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencairan anggaran untuk kompetensi sumber daya manusia (Ramadhani dan Mia, 2019).

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kerangka Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1



2.5 Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁: Regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
- H₂: Regulasi berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.
- H₃: Politik anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya .
- H₄: Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh regulasi anggaran, politik anggaran, kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian kausal. Penelitian kausal menurut Sugiyono (2012:4) adalah pengujian hubungan sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (yang mempengaruhi) yang mempengaruhi variabel dependen (dipengaruhi). Tujuan utama dari riset kausal ini adalah untuk membuktikan hubungan sebab akibat guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas berupa regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia
2. Variabel terikat berupa penyerapan anggaran.

1.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Satu Tahap (*One Shot Study*). Studi ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari, minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo, 2018:94).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis merupakan elemen yang mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data (Indiantoro dan Supomo, 2018:94). Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada individu pejabat dan bendaharawan daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Nagan Raya .

3.2. Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:55). Sementara Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Populasi penelitian ini adalah pejabat pemerintah di seluruh SKPD di Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah sebanyak 81 pejabat di 27 SKPD atau ekuivalen dimana pada masing-masing SKPD terpilih 3 (tiga) sampel yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan dan Sekretaris. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	Jumlah Sampel
1	SEKRETARIS				
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	1	1	1	3
	Sekretaris DPRD	1	1	1	3
2	DINAS				
	Dinas Syariat Islam	1	1	1	3
	Dinas Pendidikan	1	1	1	3
	Dinas Kesehatan	1	1	1	3
	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	1	1	1	3
	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Telematika	1	1	1	3
	Dinas Peternakan	1	1	1	3
	Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM	1	1	1	3
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	1	3
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	1	1	3
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	1	3

No	DINAS	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	Jumlah Sampel
	Dinas Pertambangan dan Energi	1	1	1	3
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	1	3
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	1	3
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	1	1	3
3	BADAN				
	Badan Kesbangpolinmas	1	1	1	3
	Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	1	1	3
	Badan Regulasi Pembangunan Daerah	1	1	1	3
	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	1	1	1	3
	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	1	1	1	3
	Badan Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	1	1	3
	Badan Penyuluhan dan Ketahanan tanaman pangan	1	1	1	3
4	KANTOR				
	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	1	1	1	3
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH	1	1	1	3
	Kantor Pembinaan Pendidikan	1	1	1	3
	Kantor Pelayanan Satu Pintu	1	1	1	3
	Jumlah				81

Sumber: Kantor Sekretariat Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:146), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data kuesioner secara personal (*Personally Administered Questionnaires*) menurut Indriantoro & Supomo (2018 :154) yaitu penggunaan teknik pengisian jawaban yang disampaikan dan dikumpulkan langsung dari responden. Kuesioner diberikan kepada responden dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral penilaian ini. Selanjutnya kuesioner diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan model skala interval. Skala interval menurut Indriantoro dan Supomo (2011 :104) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala	Item
Independen						
3	Politik anggaran (X ₂)	penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya (Sanjaya, 2018).	1. Pengalokasian anggaran, 2. Asas kebutuhan, 3. Asas keadilan.	1-5	Interval	C1
						C2
						C3
4	Kompetensi sumber daya manusia (X ₃)	menjelaskan kompetensi menunjukkan pada kemampuan seseorang mengelola pekerjaan dan serangkaian aktivitas untuk mencapai target dengan keahlian, keterampilan dan di dukung oleh sikap kerja (Wibowo, 2018:110)	1. Motif 2. Sifat 3. Konsep diri 4. Pengetahuan 5. Keterampilan	1-5	Interval	D1
						D2
						D3
						D4
						D5

3.5 Teknik Analisis Data

Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi yaitu suatu bentuk peralatan analisis yang dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Rancangan analisis regresi linier berganda menurut Sudarmanto (2011:59) dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penyerapan anggaran

X₁ = Regulasi

X_2 = Politik anggaran
 X_3 = Kompetensi sumber daya manusia
 b_1, b_3 = Parameter Regresi
 a = *Intercep*
 e = *Error Term*

3.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan benar apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara nyata. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau secara statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas internal, dengan cara menganalisis data dari satu kali pengtesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS Versi 22. Alat ukur yang bagus harus :

1. Dapat diandalkan
2. Hasil pengukurannya bisa diramalkan

3. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan secara parsial menggunakan *parameter regresi linier* berganda sebagaimana terlihat pada pembahasan berikut:

3.7.1 Pengujian Secara Simultan

$H_{04}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; Regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

$H_{a4}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$); Regulasi, politik anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

3.7.2 Pengujian Secara Parsial

$H_{01}: \beta_1 = 0$; Regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$; Regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

$H_{02}: \beta_2 = 0$; Politik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$; Politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

$H_{03}: \beta_2=0$; Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$; Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Aceh sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya membentang dari Pesisir pantai Samudera India yang berada di sebelah Barat tepatnya di Kecamatan Kuala hingga ke Kabupaten Aceh tengah di sebelah Timur. Di sebelah Utara Kabupaten Nagan Raya berbatasan dengan Aceh Barat dan membentang hingga ke Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Nagan Raya membawahi 10 Kecamatan dan 222 Gampong. Bupati sebagai kepala daerah adalah pemimpin di bidang pemerintahan dalam arti melaksanakan administrasi pemerintahan daerah, membina kehidupan masyarakat disegala bidang, menyelenggarakan keuangan daerah dan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan dan pembangunan tersebut, maka keberadaan kepala daerah di Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Masing-masing SKPD mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri pejabat daerah dan bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Sekretaris, kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan dari 27 SKPD yang berjumlah seluruhnya sebanyak 81 orang. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan kepangkatan dan masa kerja yang berbeda.

Karakteristik tersebut mempengaruhi mereka dalam berpendapat. Karakteristik responden pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	41-45	36	44.4
		46-50	30	37.0
		>50	15	18.5
		Total	81	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	66	81,5
		Perempuan	15	18,5
		Total	81	100,0
3	Pendidikan	S1	63	77.8
		S2	18	22.2
		Total	81	100,0
4	Masa kerja	16-20 Tahun	36	44.4
		> 20 Tahun	45	55.6
		Total	81	100,0
5	Kepangkatan	IIIc-IIIId	33	40.7
		IVa-IVb	25	30.9
		IVc-IVd	23	28.4
		Total	81	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebagian besar atau 44,4% berumur antara 41-45 tahun. Ada 18,5% dari jumlah pajabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan umur lebih dari 50 tahu. Selebihnya 37,0% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan umur antara 46–50 tahun. Pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebagian besar atau 81,5% berjenis kelamin laki-laki, hanya 18,5% yang berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar atau 77,8% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan latar pendidikan S1. Ada 22,2% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan tingkat pendidikan S2. Mereka sebagian besar atau 55,6% telah bekerja lebih

dari 20 tahun. Ada 44,4% dari jumlah pejabat yang terdata dengan masa kerja antara 16-20 tahun.

Dengan tingkat pendidikan dan masa kerja yang berbeda membuat tingkat kepangkatan pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya juga berbeda. Sebahagian besar atau 40,7% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IIIc-IIIId. Ada 28,4% dari jumlah mereka dengan golongan kepangkatan antara IVc-IVd. Selebihnya atau 30,9% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IVa-IVb.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel Penyerapan Anggaran

Variabel penelitian penyerapan anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gambaran Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya

No	Penyerapan anggaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran.	0	0,0	0	0,0	42	51.9	27	33.3	12	14.8	3,63
2.	Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).	0	0,0	0	0,0	34	42.0	35	43.2	12	14.8	3,73
3.	Pencairan anggaran untuk pembayaran kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kompetensi sumber daya manusia	0	0,0	0	0,0	36	44.4	42	51.9	3	3.7	3,59
	Rerata	3,65										

Sumber : Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan tingkat penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,65 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada SKPD Kabupaten Nagan Raya menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang penyerapan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan menjadi indikator tingkat penyerapan anggaran yang terbaik pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai jawaban rata-rata 3,73 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).

Sementara ketepatan jadwal penarikan anggaran menjadi indikator tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban rata-rata 3,59 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Kompetensi SDM.

4.3.2 Variabel Regulasi

Variabel penelitian regulasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Kesiapan Pejabat Menghadapi Regulasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya

No	Regulasi	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pejabat daerah harus dapat memahami secara detail dan seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.	0	0,0	6	7.4	33	40.7	33	40.7	9	11.1	3,56
2.	Pejabat daerah harus selalu mempelajari semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk peraturan baru sebagai pergantian peraturan lama.	0	0,0	0	0.0	39	48.1	30	37.0	12	14.8	3,67
3.	Seluruh proses pekerjaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sehingga harus selalu diperhatikan jika tidak timbul permasalahan ke depan.	0	0,0	6	7.4	24	29.6	39	48.1	12	14.8	3,71
	Rerata	3,64										

Sumber : Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan tingkat kesiapan pejabat dan bendaharawan daerah dalam menghadapi regulasi keuangan pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,64 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang kesiapan menghadapi regulasi tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator kesiapan menghadapi regulasi yang terbaik pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai jawaban rata-rata 3,71 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor

untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika seluruh proses pekerjaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sehingga harus selalu diperhatikan jika tidak timbul permasalahan ke depan.

Sementara pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan menjadi indikator kesiapan menghadapi regulasi yang masih rendah dengan nilai jawaban rata-rata 3,56 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika pejabat daerah harus dapat memahami secara detail dan seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

4.3.3 Variabel Politik Anggaran

Variabel penelitian politik anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Persepsi Pejabat Terhadap Politik Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya

No	Politik anggaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Anggaran selalu dialokasikan berdasarkan skala prioritas terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat.	0	0,0	3	3.7	21	25.9	54	66.7	3	3.7	3,71
2.	Program kerja anggaran akan disahkan jika benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.	0	0,0	9	11.1	18	22.2	54	66.7	0	0.0	3,56
3.	Anggaran selalu direncanakan secara merata untuk semua bidang kehidupan masyarakat tanpa memandang agama, ras dan kelompok tertentu.	0	0,0	0	0.0	27	33.3	54	66.7	0	0.0	3,67
	Rerata	3,64										

Sumber : Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan persepsi pejabat daerah dan bendaharawan tentang politik anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,64 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang politik anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Pengalokasian anggaran menjadi indikator persepsi tentang politik anggaran yang terbaik pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai jawaban rata-rata 3,71 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika anggaran selalu dialokasikan berdasarkan skala prioritas terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Sementara perencanaan anggaran sesuai azas kebutuhan, menjadi indikator persepsi tentang politik anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,56 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika program kerja anggaran akan disahkan jika benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.3.4 Variabel Kompetensi SDM

Variabel penelitian kompetensi SDM dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Gambaran Tingkat Kompetensi SDM Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya

No	Kompetensi SDM	Sgt Tdl Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Dalam bekerja Pejabat daerah selalu termotivasi bagaimana bidang kerja dapat lebih maju dan semua kegiatan instansi dapat tercapai sesuai rencana.	0	0,0	3	3.7	39	48.1	30	37.0	9	11.1	3,56
2.	Dalam bekerja Pejabat daerah selalu mengedepankan akal sehat untuk mengarahkan setiap usaha bagi kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat.	0	0,0	9	11.1	21	25.9	42	51.9	9	11.1	3,63
3.	Disaat ada waktu luang Pejabat daerah melakukan hal-hal yang lebih positif untuk pekerjaan Pejabat daerah ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara.	0	0,0	0	0.0	39	48.1	27	33.3	15	18.5	3,71
4.	Pejabat daerah dapat bekerja secara efektif dengan pengetahuan yanag Pejabat daerah miliki tanpa harus banyak diarahkan oleh atasan atau rekan kerja.	0	0,0	3	3.7	42	51.9	33	40.7	3	3.7	3,44
5	Dengan pengalaman dan keahlian yang Pejabat daerah miliki saat ini Pejabat daerah dapat menyelesaikan semua masalah yang di hadapi di bidang kerja Pejabat daerah.	0	0,0	9	11.1	27	33.3	36	44.4	9	11.1	3,56
	Rerata	3,58										

Sumber : Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan tingkat kompetensi SDM pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,58 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang kompetensi SDM tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Konsep diri menjadi indikator tingkat kompetensi SDM yang terbaik pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai jawaban 3,71 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan

bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika disaat ada waktu luang, Pejabat daerah melakukan hal-hal yang lebih positif untuk pekerjaan Pejabat daerah ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara.

Sementara tingkat pengetahuan yang baik menjadi indikator kompetensi SDM yang masih rendah dengan nilai jawaban sebesar 3,44 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika pejabat daerah dapat bekerja secara efektif dengan pengetahuan yang Pejabat daerah miliki tanpa harus banyak diarahkan oleh atasan atau rekan kerja.

4.3. Hasil Pengujian Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1) Hasil Uji Validitas

Sebelum dianalisis lebih lanjut dalam model analisis regresi linier berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan analisis korelasi person. Uji ini dimaksud untuk mendapatkan data yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi. Kuesioner harus bebas dari kesalahan dalam arti kuesioner dapat memberikan informasi yang relevan mengenai aktivitas dan perilaku yang diteliti.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation*. Uji ini menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan hubungan skor item pertanyaan dengan skor data yang digunakan secara keseluruhan. Kemudian nilai korelasi tersebut hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar 81 sampel yaitu sebesar 0,220. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 81	Keterangan
B1	Penyerapan anggaran (Y)	0,870	0,220	Valid
B2		0,702	0,220	Valid
B3		0,617	0,220	Valid
C1	Regulasi (X ₁)	0,703	0,220	Valid
C2		0,883	0,220	Valid
C3		0,861	0,220	Valid
D1	Politik anggaran (X ₂)	0,928	0,220	Valid
D2		0,965	0,220	Valid
D3		0,883	0,220	Valid
E1	Kompetensi SDM (X ₃)	0,685	0,220	Valid
E2		0,669	0,220	Valid
E3		0,784	0,220	Valid
E4		0,683	0,220	Valid
E5		0,642	0,220	Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan semua butir pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data penyerapan anggaran (Y), kesiapan Menghadapi Regulasi (X₁), persepsi politik anggaran (X₂) dan Kompetensi SDM (X₃) dinyatakan valid atau data yang dikumpulkan telah menggambarkan suatu kenyataan terjadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena nilai koefisien korelasi dari masing-masing nilai atribut yang membentuk variabel tersebut lebih besar dari nilai kritis product-moment pada *level of significant* 5% (0,220) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian seluruh butir indikator ukur dari butir pertanyaan kuesioner tersebut sudah dapat dipercaya dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data yang dapat dipercaya. Maka dilakukan pengukuran secara sistematis terhadap instrumen penelitian yaitu angket atau dalam bahasa asing dikenal dengan kuesioner. Uji Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau kepercayaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban yang

diberikan responden. Semakin konsisten jawaban yang diberikan maka akan semakin terpercaya alat ukur yang digunakan.

Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian dilakukan dengan teknik belahan data dengan dukungan rumus koefisien alpha dari Cronbach atau biasa disebut dengan *Cronbach Coefficient Alpha*. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). Jika derajat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.7.

Tabel. 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Atribut	Item Pertanyaan	Nilai Cronbach Alpha	Ket
1	Penyerapan anggaran (Y)	3	B1 s/d B3	0,675	Handal
2	Regulasi (X_1)	3	C1 s/d C3	0,774	Handal
3	Politik anggaran (X_2)	3	D1 s/d D3	0,909	Handal
4	Kompetensi SDM (X_3)	5	B1 s/d B5	0,723	Handal

Sumber :Data Primer (diolah), 2023

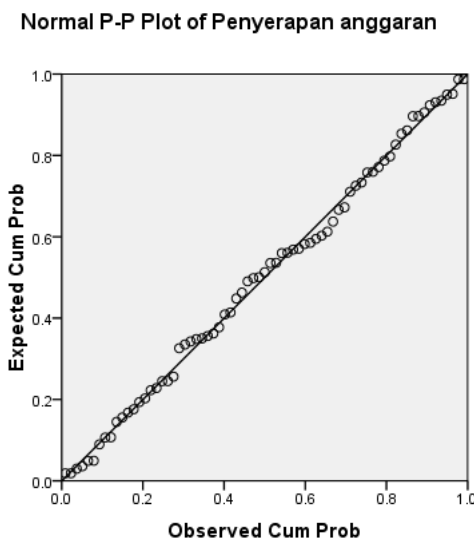
Hasil uji reliabilitas terhadap data-data yang digunakan untuk variabel penyerapan anggaran (Y), regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3), pada SKPD Kabupaten Nagan Raya diperoleh nilai alpha masing-masing lebih besar dari standar ukuran koefisien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). Dengan demikian data yang digunakan untuk ke lima variabel telah dapat di percaya dan telah dapat dianalisis lebih lanjut dalam model analisis regresi.

4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik.

1) Pengujian Normalitas.

Data sekunder yang digunakan dalam setiap variabel dalam penelitian ini harus mencerminkan data skala yang bebas dari pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi dari nilai-nilai sampel pada variabel penelitian sesuai dengan distribusi teoritis maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan gambar normal P –P Plot. Gambar ini menunjukkan sebaran *standarrized residual* berada dalam kisaran garis diagonal seperti terlihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1
Grafik Uji Normalitas Variabel Penyerapan anggaran



Dari 81 data empiris yang digunakan dalam variabel penyerapan anggaran mengikuti garis diagonalnya atau adanya pola yang non linier dan independen. Begitu juga untuk variabel lainnya yang diperlihatkan dalam Lampiran, seluruhnya terdistribusi secara normal.

2) Heteroskedastisitas

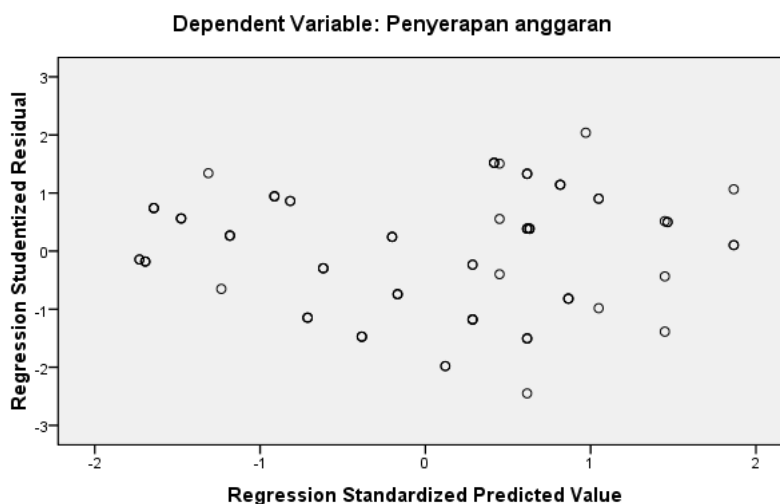
Asumsi dari penggunaan data skala dalam model pengaruh regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) terhadap penyerapan anggaran (Y)

berpotensi terjadinya gangguan (*disturbance*) U_1 yang di kenal dengan gangguan Homoscedastic. Homoscedastic terjadi jika data dari kedua variabel tersebut mempunyai varian yang sama, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesalahan. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Output SPSS hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2
Scatterplot Uji Heteroskedastisiats



Berdasarkan chart diatas tidak memperlihatkan pola data bergelombang, melebar kemudian menyempit yang membentuk pola tertentu yang teratur. Dengan demikian hubungan tersebut tidak terjadi heteroskesdastisitas.

4) Pengujian Multikolinieritas.

Hubungan linier tiga variabel bebas yang digunakan dalam model regresi linier dalam penelitian ini yaitu regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM

(X_3) harus selalu sempurna atau bebas dari ketergantungan yang akan mempengaruhi nilai parameter regresi. Ketergantungan antara dua variabel bebas tersebut dapat dideteksi melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dihasilkan dari analisis *collinearity diagnostics* dalam paket SPSS regresi linier. Jika VIF tersebut lebih besar dari 10,0 maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini diyakini mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Sebaliknya apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,0 dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Regulasi (X_1)	0,461	2.171	Non Multikolinieritas
2	Politik anggaran (X_2)	0,637	1.570	Non Multikolinieritas
3	Kompetensi SDM (X_3)	0,647	1.545	Non Multikolinieritas

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 5.3 menunjukkan nilai VIF dari tiga variabel bebas yang terlibat dalam model analisis yaitu regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) masing-masing $< 10,0$, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel bebas tersebut. Dengan demikian model regresi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini masing-masing diprediksi secara terpisah oleh kekuatan masing-masing variabel dan tidak terjadi ketergantungan secara berarti, sehingga model tersebut sudah dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Koefisien Regresi Linier Berganda

Pengaruh regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) terhadap penyerapan anggaran (Y) pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dapat di

buktikan dengan model regresi linier berganda dengan mengoperasionalkan 4 (empat) variabel. Penyerapan anggaran (Y) menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel bebas (*independent variable*) yaitu regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3). Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran
dan Kompetensi SDM Terhadap Penyerapan Anggaran

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,962	0,333	
	Regulasi	0,225	0,111	0,265
	politik anggaran	0,172	0,097	0,211
	Kompetensi SDM	0,347	0,093	0,367

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Dari hasil out put SPSS pada Tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,962 + 0,225X_1 + 0,172X_2 + 0,347X_3 + \varepsilon$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta penyerapan anggaran sebesar 0,962 menjelaskan jika regulasi (X_1) tidak mengalami perubahan, politik anggaran (X_2) tidak terjadi dan kompetensi SDM (X_3) tidak mengalami perubahan, maka penyerapan anggaran (Y) pada SKPD Kabupaten Nagan Raya secara konstan berada pada posisi 0,962 satuan. Kondisi ini menandakan penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Nagan Raya masih tergolong rendah atau di bawah nilai 1.

Koefisien regresi pengaruh regulasi adalah sebesar 0,225 menjelaskan setiap adanya perubahan satu satuan pada regulasi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,225 satuan. Kondisi ini disebabkan karena regulasi adalah konsep penting yang mengacu

pada seperangkat aturan, pedoman dan prinsip yang dilakukan oleh pemerintah untuk memandu dan mengendalikan perilaku individu untuk menciptakan keadilan, efisiensi dan kesejahteraan sosial (James, 2018: 30). Tujuan regulasi adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan publik, dan jika tidak dilakukan regulasi akan adanya praktik-praktik yang tidak efisien dan tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel (Apriyanti (2018:51). Dengan adanya regulasi yang jelas maka dapat menghilangkan berbagai kegiatan yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk dalam penyerapan anggaran.

2. Koefisien regresi pengaruh politik anggaran sebesar 0,172, menjelaskan setiap terjadinya aktivitas dan perilaku politik dalam perencanaan anggaran satu satuan maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,172 satuan. Hal di sebabkan karena apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai, ini disebabkan karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas disepakati bersama dan disetujui eksekutif. Apabila anggaran yang direncanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat memperlambat waktu kegiatan/program kerja (Ramadhani dan Mia, 2019).
3. Koefisien regresi pengaruh kompetensi SDM adalah sebesar 0,347 satuan menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu satuan kompetensi pejabat dan bendaharawan daerah maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,347 satuan. Hal ini disebabkan karena penyerapan anggaran merupakan bahagian dari keberhasilan dalam kompetensi sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran (Wicaksono, dkk 2007 dalam Sanjaya, 2018). Dengan kompetensi SDM yang baik proses pengadaan barang dan jasa [ada tahap pelaksanaan anggaran akan mudah terwujud (Ramadhani dan Mia, 2019).

4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara kesiapan Menghadapi Regulasi , persepsi politik anggaran dan Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran selalu memiliki hubungan secara simultan yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien diterminansi. Koefisien ini menjelaskan keeratan hubungan keseluruhan variabel bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1 sampai dengan +1 dan semakin mendekati nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien dterminasi berganda adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hubungan korelasi dan determinasi regulasi, politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) dengan variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,702	0,493	0,472

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Koefisien korelasi R sebesar 0,702 menjelaskan terdapat hubungan yang positif antar variabel bebas yaitu regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) dengan penyerapan anggaran (Y) pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan keeratan hubungan adalah 0,702 atau 70,20%, artinya setiap terjadinya kenaikan 100% secara serentak pada regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,702%. Hubungan tersebut tergolong kuat dengan keeratan hubungan antara 0,60% – 0,799% (Sugiyono, 2012).

Koefisien determinasi R Square sebesar 0,493 menjelaskan, peran variabel regulasi (X_1), politik anggaran (X_2) dan kompetensi SDM (X_3) dalam mempengaruhi

penyerapan anggaran (Y) pada SKPD Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 0,493 atau 49,2%. Sementara sisa (nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,508 atau 50,80% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

H₁: Nilai $\beta_1=0,225$, $\beta_2= 0,172$, dan $\beta_3= 0,347$ berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1=\beta_2=\beta_3\neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhani dan Mia, 2019) dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H₂: Nilai $\beta_1= 0,225$, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani dan Mia (2019) dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa regulasi secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H₃: Nilai $\beta_2= 0,172$, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani dan Mia

(2019) dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa politik anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H₄: Nilai $\beta_3 = 0,347$, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani dan Mia (2019) dan Sanjaya (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh variabel regulasi dan kompetensi SDM terhadap kinerja SKPD

Variabel regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,702. Nilai tersebut menjelaskan jika regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM meningkat sebesar 1% maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,702%.

Kemampuan ketiga variabel tersebut dalam mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya masih kurang dominan dengan nilai determinasi 0,493 satuan atau 49,3%. Artinya masih terdapat variabel lainnya yang relatif lebih dominan diluar model yaitu 50,70% yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD Nagan Raya.

4.5.2 Pengaruh variabel regulasi terhadap penyerapan anggaran

Variabel regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,225 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya regulasi 1 satuan maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,225 satuan.

4.5.3 Pengaruh variabel politik anggaran terhadap penyerapan anggaran

Variabel politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,172 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya politik anggaran 1 satuan maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,172 satuan.

4.5.4 Pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran

Variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,347 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya kompetensi SDM pejabat dan bendaharawan daerah sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,225 satuan.

4.6 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menimbulkan impikasi yang luas bagi semua pihak khususnya bagi SKPD Kabupaten Nagan Raya sebagai tempat dilakukannya penelitian. Penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya telah terlaksana secara baik. Kondisi ini disebabkan secara nyata oleh adanya regulasi yang dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu, serta adanya dukungan kompetensi SDM. Ketiga variabel tersebut berpengaruh secara nyata terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Nagan Raya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
2. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
3. Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
4. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Pejabat dan bendaharawan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya harus siap menghadapi regulasi yang berubah setiap waktu dan mereka harus dapat memahami secara detail dan seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Kabupaten Nagan Raya perlu mendorong terciptanya politik anggaran yang prioritas bagi kepentingan masyarakat khususnya kalangan masyarakat bawah dengan kebijakan anggaran akan disahkan jika benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. perlu dilaksanakan secara lebih berkualitas karena pengaruhnya yang besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan kesiapan Menghadapi Regulasi terutama pada aspek keterbukaan harus dapat di atasi.
4. Pejabat daerah harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang kerjanya sehingga dapat bekerja secara efektif dengan pengetahuan yang dimilikinya tanpa harus menunggu arahan dari atasan atau pihak lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apriyanti, Hani Werdi (2018) *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Busro, Muhammad. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Cahyani, Erika Nur (2019) Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Kompetensi sumber daya manusia . *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi* Vol 7 No 7 Hal 1-13
- Edison, Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 10 No. 2, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat Media Sain Indoensia.
- Harahap, Sasmita Atika Sari., Taufeni Taufik dan Nurazlina (2020) Pengaruh Regulasi Anggaran, Kompetensi sumber daya manusia , Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 13, No. 1 Universitas Riau, Program Studi Akuntansi.
- Handajani and L. Effendy (2018)., "Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada SKPD ," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 19, pp. 76-91.
- Hartono, Lakharis Inuzul, sri Apriyanti Husain (2021), *Akuntansi sektor publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Untuk Akuntansi Dan Manajemen”, Yogyakarta: BPFE
- James, Gilad (2018) *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Misteri Scool.
- Jaharuddin dan Radiana Dhewayani .(2020) *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Buku 2 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Karianga, Hendra (2015) *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Publisher Prenada Media

- Komarudin dan Asep Rachmatullah (2020) *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Banten.
- Khusaini, Mohamad. (2019) *Ekonomi Publik*. Malang: Tim UB Press
- Mardiasmo, (2018)., *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Marwansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Alfabeta.
- Mustika, Ningtyas Weni Prabatiwi (2020) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa , Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi UMM* Vol 2 No 1 Hal 1-12.
- Nurkholis, Moh. Khusaini · (2019) *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: TIM UB Press.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*
- Ramdhani, Dadan dan Indi Zaenur Anisa (2017) Pengaruh Regulasi Anggaran, politik anggaran Dan Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada SKPD Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 No.1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Regulasi Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2 Hal 710-726*. Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ritonga., Pandapotan (2021) *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press
- Rahmawati, Rika Septi dan Jouzar Farouq Ishak, (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 1, Hal 180–189
- Sanjaya (2018) Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat *Jurnal Akuntansi UNP* Vol 6 No 3 Hal 1-13.
- Santoso, Bagus (2018) *Dinamika Politik*. Riau: Unsri

- Sari, Ovi Hamidah., Mardia Mardia, Mila Susanti (2022) *Manajemen UKM*. Medan: yayasan Kita Menulis
- Sedarmayanti (2019). *Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: CV Mandar
- Selviany · (2022) *Regulasi Properti di Indonesia*. Pekalongan: NEM
- Sumanti, Rati (2018) Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Daerah: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 8 No 2. Hal 166-129.
- Sujatmika, (2020), *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang: Peneleh
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Refika.
- Sujatmika (2020) *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang Peneleh.
- Sutrisno, Edy (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Syahwil, Muhamad dan Irma Damayanti (2022) Pengaruh Faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No 1 Vol 5 Hal 169-179.
- Verniati, Erlin, Yerlianan (2022) Politik Anggaran Untuk Penanganan Covid - 19 (Penelitian di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi* Tidak dipublikasi. Hal 1-65.
- Yuliani, Irma (2019) *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoensia.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Yusup (2021) *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Sumatera Selatan: LD Media

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi, politik anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
2. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
3. Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.
4. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Pejabat dan bendaharawan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagan Raya harus siap menghadapi regulasi yang berubah setiap waktu dan mereka harus dapat memahami secara detail dan seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Kabupaten Nagan Raya perlu mendorong terciptanya politik anggaran yang prioritas bagi kepentingan masyarakat khususnya kalangan masyarakat bawah dengan kebijakan anggaran akan disahkan jika benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. perlu dilaksanakan secara lebih berkualitas karena pengaruhnya yang besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan kesiapan Menghadapi Regulasi terutama pada aspek keterbukaan harus dapat di atasi.
4. Pejabat daerah harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang kerjanya sehingga dapat bekerja secara efektif dengan pengetahuan yang dimilikinya tanpa harus menunggu arahan dari atasan atau pihak lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apriyanti, Hani Werdi (2018) *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bastian, Indra (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Busro, Muhammad. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Cahyani, Erika Nur (2019) Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Kompetensi sumber daya manusia . *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi* Vol 7 No 7 Hal 1-13
- Edison, Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Fajar, Nurul dan Muhammad Arfan (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 10 No. 2, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain (2021) *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Barat Media Sain Indoensia.
- Harahap, Sasmita Atika Sari., Taufeni Taufik dan Nurazlina (2020) Pengaruh Regulasi Anggaran, Kompetensi sumber daya manusia , Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 13, No. 1 Universitas Riau, Program Studi Akuntansi.
- Handajani and L. Effendy (2018)., "Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada SKPD ," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol. 19, pp. 76-91.
- Hartono, Lakharis Inuzul, sri Apriyanti Husain (2021), *Akuntansi sektor publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Untuk Akuntansi Dan Manajemen”, Yogyakarta: BPFE
- James, Gilad (2018) *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Misteri Scool.
- Jaharuddin dan Radiana Dhewayani .(2020) *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Buku 2 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Karianga, Hendra (2015) *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Publisher Prenada Media

- Komarudin dan Asep Rachmatullah (2020) *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Banten.
- Khusaini, Mohamad. (2019) *Ekonomi Publik*. Malang: Tim UB Press
- Mardiasmo, (2018)., *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Marwansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Alfabeta.
- Mustika, Ningtyas Weni Prabatiwi (2020) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa , Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi UMM* Vol 2 No 1 Hal 1-12.
- Nurkholis, Moh. Khusaini · (2019) *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: TIM UB Press.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*
- Ramdhani, Dadan dan Indi Zaenur Anisa (2017) Pengaruh Regulasi Anggaran, politik anggaran Dan Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada SKPD Provinsi Banten *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 No.1* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan (2019) Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Regulasi Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2 Hal 710-726*. Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ritonga., Pandapotan (2021) *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press
- Rahmawati, Rika Septi dan Jouzar Farouq Ishak, (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 1, Hal 180–189
- Sanjaya (2018) Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat *Jurnal Akuntansi UNP* Vol 6 No 3 Hal 1-13.
- Santoso, Bagus (2018) *Dinamika Politik*. Riau: Unsri

- Sari, Ovi Hamidah., Mardia Mardia, Mila Susanti (2022) *Manajemen UKM*. Medan: yayasan Kita Menulis
- Sedarmayanti (2019). *Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: CV Mandar
- Selviany · (2022) *Regulasi Properti di Indonesia*. Pekalongan: NEM
- Sumanti, Rati (2018) Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Daerah: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 8 No 2. Hal 166-129.
- Sujatmika, (2020), *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang: Peneleh
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Refika.
- Sujatmika (2020) *Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila*. Malang Peneleh.
- Sutrisno, Edy (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Syahwil, Muhamad dan Irma Damayanti (2022) Pengaruh Faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No 1 Vol 5 Hal 169-179.
- Verniati, Erlin, Yerlianan (2022) Politik Anggaran Untuk Penanganan Covid - 19 (Penelitian di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi* Tidak dipublikasi. Hal 1-65.
- Yuliani, Irma (2019) *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indoensia.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Yusup (2021) *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Sumatera Selatan: LD Media

KUESIONER
PENGARUH REGULASI ANGGARAN, POLITIK ANGGARAN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NAGAN RAYA

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang benar. Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

No Sampel :

Keterangan: Jawablah pertanyaan anda sebenarnya dengan memberi tanda (✓) pada kotak yang anda anggap benar

Identitas Konsumen/Responden

1. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-45 Tahun
☐ 46-50 Tahun
☐ >50 Tahun
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
3. Pendidikan : ☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
☐ S.3
4. Masa Kerja : ☐ <10 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ 16-20 Tahun
☐ >20 Tahun
5. Gol Pangkat : ☐ IIIa-IIIb
☐ IIIc-IIId
☐ IVa-Ivb
☐ Ivc-Ivd

A. Penyerapan anggaran

- | | Sgt Tdk Setuju | Tidak Setuju | Krg Setuju | Setuju | Sangat Setuju |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Realisasi anggaran setiap tahun telah dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di atas 80% dari rencana anggaran. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Rencana dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak | | | | | |

menyimpang dari indikator kinerja yang ingin dicapai (Renstra).	☐	☐	☐	☐	☐
3. Pencairan anggaran untuk pembayaran kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kompetensi sumber daya manusia	☐	☐	☐	☐	☐

B. Regulasi anggaran

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1. Saya harus dapat memahami secara detail dan seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Saya harus selalu mempelajari semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk peraturan baru sebagai pergantian peraturan lama.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Seluruh proses pekerjaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sehingga harus selalu diperhatikan jika tidak timbul permasalahan ke depan.	☐	☐	☐	☐	☐

C. Politik anggaran

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1. Anggaran selalu dialokasikan berdasarkan skala prioritas terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Program kerja anggaran akan disahkan jika benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Anggaran selalu direncanakan secara merata untuk semua bidang kehidupan masyarakat tanpa memandang agama, ras dan kelompok tertentu.	☐	☐	☐	☐	☐

D. Kompetensi sumber daya manusia

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1. Dalam bekerja saya selalu termotivasi bagaimana bidang kerja dapat lebih maju dan semua kegiatan instansi dapat tercapai sesuai rencana.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Dalam bekerja saya selalu mengedepankan akal sehat untuk mengarahkan setiap usaha bagi kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Disaat ada waktu luang saya melakukan hal-hal yang lebih positif untuk pekerjaan saya ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4. Saya dapat bekerja secara efektif dengan pengetahuan yang saya miliki tanpa harus banyak diarahkan oleh atasan atau rekan kerja. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5. Dengan pengalaman dan keahlian yang saya miliki saat ini Saya dapat menyelesaikan semua masalah yang di hadapi di bidang kerja saya. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐